LAPORAN KEUANGAN
SATKER DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
KODE SATKER 690708
SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2023

Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 31 Desember 2023

SATKER DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI
Jl. Samarinda Kota Baru Kota Jambi

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga diharapkan dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Drs. H. Ismed Wijaya, MM
NIP. 19701025 199003 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Daftar Lampiran	III
Daftar Tabel	V
Daftar Gambar	XI
Pernyataan TanggungJawab	XII
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya	52
VI. Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 2.	Neraca
Lampiran 3.	Laporan Operasional
Lampiran 4.	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran 5.	Neraca Percobaan Akrual
Lampiran 6.	Neraca Percobaan Kas
Lampiran 7.	Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Lampiran 8	LRA Belanja Menurut Akun
Lampiran 9	LRA Belanja Menurut Sumber Dana Jenis Belanja
Lampiran 10	LRA Belanja Menurut Sumber Dana Program Kegiatan
Lampiran 11	LRA Menurut Sumber Dana Kegiatan Output
Lampiran 12	LRA Pendapatan Menurut Akun
Lampiran 13	BAR Rekon SAKTI-SPAN
Lampiran 14	Laporan Fa Detail (16 Segmen)
Lampiran 15	LPJ Bendahara Pengeluaran
Lampiran 16	Laporan Barang Intrakomtabel
Lampiran 17	Laporan Posisi BMN
Lampiran 18	Komposisi Jumlah Pegawai Per 31 Desember 2023
Lampiran 19	BAR PNBP
Lampiran 20	BAR REKON BMN Tingkat Lembaga
Lampiran 21	BAR REKON BMN Tingkat Satker
Lampiran 22	Rekap PNBP Januari s.d. Desember 2023

DAFTAR TABEL

Tabel A.2.1	Rincian Perbandingan Rincian Perbandingan Pagu Anggaran Awal (Nota Keuangan APBN) dan Revisi Laporan Keuangan 2023	
Tabel A.5.1	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Satker	
Tabel A.5.2	Masa Manfaat Aset Tetap	
Tabel A.5.3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	
Tabel B.1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	
Tabel B.1.1	Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel B.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	
Tabel B.2.1	Anggaran dan Realisasi berdasarkan Kegiatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	
Tabel B.2.2	Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel B.3	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel B.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023	
Tabel B.4.1	Perbandingan Realisasi Belanja Barang akun Detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel B.5	Perbandingan Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel B.5.1	Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel C.1	Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel C.2	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel C.3	Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel C.4	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel C.5	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 desember 2023	
Tabel C.5.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	
Tabel C.5.2	Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 Setelah AkumulasiPenyusutan	
Tabel C.5.3	Rincian Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	
Tabel C.6	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023	
Tabel C.6.1	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	
Tabel C.6.2	Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 Setelah AkumulasiPenyusutan	
Tabel C.6.3	Rincian Pencatatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	
Tabel C.7	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	

Tabel C.8	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset	
Tabel C.8.1	Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023	
Tabel C.8.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023	
Tabel C.8.3	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dari Belanja Modal Lainnya	
Tabel C.9	Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023	
Tabel C.9.1	Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-Lainper 31 Desember 2023	
Tabel C.9.2	Rincian Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 Setelah Akumulasi Penyusutan	
Tabel C.10	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnyaper 31 Desember 2023	
Tabel C.11	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	
Tabel C.11.1	Perbandingan Rincian Utang Pihak Ketiga	
Tabel C.12	Perbandingan Rincian Utang yang belum ditagihkan	
Tabel D	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2023	
Tabel D.1	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel D.2	Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel D.2.1	Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO per 31 Desember 2023	
Tabel D.3	Perbandingan Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel D.3.1	Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO per 31 Desember 2023	
Tabel D.4	Perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel D.4.1	Perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasadi LO per 31 Desember 2023	
Tabel D.5	Perbandingan Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel D.5.1	Perbandingan Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	
Tabel D.6	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	
Tabel D.6.1	Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas di LO per 31 Desember 2023	
Tabel D.7	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode yang Berakhir pada 31 desember 2023 dan 2022	
Tabel D.8	Perbandingan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022	

Tabel E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi Per 31 Desember 2023 dan 2022	
Tabel E.3.3	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	
Tabel E.3.4	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2023 dan 2022	
Tabel E.4	Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	

DAFTAR GAMBAR

Gambar B.2 Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, 23 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi,

Drs. H. Ahmed Wijaya, MM
NIP. 19701025 199003 1002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Semester II Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0,- atau mencapai 0% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0,-

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.916.373.058,- atau mencapai 97% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.008.601.000,-

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0,-, Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp.0,-; Aset Tetap (netto)sebesar Rp.0,-; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp.0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.2.916.373.058,- sehingga terdapat Defisit/Surplus Kegiatan Operasional sebesar Rp-2.916.373.058,-. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp.0,-, surplus/deficit Kegiatan Non operasional Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit/Surplus-LO sebesar Rp.-2.916.373.058,-

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi penurunan/peningkatan atau penurunan/peningkatan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah Rp0,-. Surplus/Defisit-LO sebesar Rp.-2.916.373.058,- ditambah Transaksi antar Entitas sebesar Rp.2.916.373.058,- terjadi penurunan/peningkatan Ekuitas sebesar Rp.0,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,-

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR
31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		% THD ANGGARAN	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		**0**	**0**	0	**0**
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	0	0	0	
Belanja Barang	B.4	3.008.061.000	2.916.373.058	97%	
Belanja Modal	B.5	0		0	
JUMLAH BELANJA		**3.008.061.000**	**2.916.373.058**	97%	**0**

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

NERACA

PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Penurunan/peningkatan (Penurunan/peningkatan)	%
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Jumlah	
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0	0	0
Persediaan yang belum diregister	0	0	0	0
JUMLAH ASET LANCAR	0	0	0	0
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
AKUMULASI PENYUSUTAN	0	0	0	0
JUMLAH ASET TETAP	0	0	0	0
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	0	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0	0
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	0	0	0
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	0
JUMLAH ASET	0	0	0	0

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Penurunan/peningkatan (Penurunan/peningkatan)	%
	30 September 2023	31 Desember 2022	Jumlah	
1	2	3	4	5
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0
Utang yang Belum Ditagihkan	0	0	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	**0**	0	**0**
JUMLAH KEWAJIBAN	**0**	**0**	**0**	**0**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	0	0	0	0
JUMLAH EKUITAS	0	**0**	0	0
JUMLAH EKUITAS	0	**0**	0	**0**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	**0**	0	**0**

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	0	-
JUMLAH PENDAPATAN		**0**	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	-
Beban Persediaan	D.3	148.662.800	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.276.659.460	-
Beban Pemeliharaan	D.5	0	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.341.050.798	-
Beban Bantuan Sosial	D.7	0	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	150.000.000	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	-
JUMLAH BEBAN		**2.916.373.058**	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-2.916.373.058	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	0	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	0	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	0	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	0	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	0	-
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**0**	-
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO		**-2.916.373.058**	-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAMBI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1	0	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	-2.916.373.058	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITA	E.3	0	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E.3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	0	0
Lain-lain	E.3.5	0	0
Jumlah		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.916.373.058	0
PENURUNAN/PENINGKATAN/ PENURUNAN/PENINGKATAN EKUITAS			
EKUITAS AKHIR	E.5	**0**	**0**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan.Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur Jambi merupakan instansi yang dibentuk bertujuan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

Untuk mewujudkan tujuan diatas,Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berkomitmen dengan visi " Menjadi Institusi yang Prima dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Menuju Masyarakat yang Sejahtera".

Upaya mewujudkan visi tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dengan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

- Meningkatkan kemampuan aparat dan peran serta lembaga masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan
- Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan pengembangan ketahanan pangan serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaanya

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Laporan Keuangan Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Semester II Tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi seperti Eselon I,

Sekretariat Wilayah, serta Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi disusun berdasarkan hasil unduh(*download*) laporan keuangan satuan kerja Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi melalui aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2023.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan yaitu dengan cara:

1. Pengumpulan data melalui pengunduhan dari Aplikasi SAKTI keluaran Kementerian Keuangan, dimana Satker melakukan upload data berupa Arsip Data Komputer (ADK) ke Aplikasi SAKTI untuk kemudian diunduh secara berjenjang melalui Aplikasi SAKTI. Pada penyusunan LK Semester II Tahun 2023 ini diunduh berdasarkan Aplikasi SAKTI tanggal 31 Desember 2023.

A.3. Basis Akuntansi

Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat senilai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau senilai nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat senilai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah- kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. **Pendapatan- LRA**
   - Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
   - Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
   - Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
2. **Pendapatan- LO**
   - Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
   - Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
   - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
3. **Belanja**
   - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
   - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan/peningkatan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban yang berasal dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526) dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa (57) diakui dan disajikan sebagai beban apabila sudah diterbitkan berita acara serah terima (BAST).

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

2) Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Tabel A.5.1 Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

4) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.

5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

   a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

   b) Harga standar (kapitalisasi) apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

   c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP Sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada peraturan tersebut pada Pasal 12 Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

1. Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526111);

2. Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526112);
3. Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526113);
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526114);
5. Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526115);
6. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526211);
7. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526212); dan
8. Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Sedangkan pada Pasal 36 bahwa persediaan yang langsung diserahkan kepada pihak penerima, transaksi penyerahan/dijual kepada masyarakat/pemda dibuktikan dengan dokumen sumber pengeluaran persediaan untuk:

a) Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dapat berupa:
   a. BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja;
   b. BAST Persediaan antara kepala satuan kerja atau PPK dengan penerima;
   c. BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD; atau
   d. Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.

b) Kantor Pusat dan Kantor Daerah dapat berupa:
   (1) Surat Keputusan Hibah;
   (2) BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD;
   (3) BAST Persediaan antara kepala satuan kerja/PPK dengan penerima;
   (4) BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja; atau
   (5) Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.

Disamping itu, Pasal 43 menjelaskan bahwa seluruh pelaporan persediaan pada tanggal pelaporan dicatat berdasarkan *opname* fisik. Persediaan dilakukan untuk mengetahui jumlah Persediaan dan kondisi catatan dalam pembukuan pengelolaan Persediaan yang belum dipakai. *Opname* fisik Persediaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara sensus per semester atau periode laporan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No : S-1984/PB/2017 Tanggal 21 Februari 2017 Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) berupa uang yang meliputi:

Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526121)
Belanja Alsin Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526122)
Belanja Gedung & Bangunan Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526123)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jringan Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526124)
Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah dalam bentuk uang (526312)

b. Aset Tetap

1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

3) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

5) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.

6) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.

7) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan.

c. Penyusutan Aset Tetap

1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan/peningkatan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

   a) Tanah;
   b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
   c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusUntukan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka

Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tabel A.5.2. Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mengacu padaPeraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata CaraPemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara PelaksanaanSewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunandari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian. Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukanusul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barangmaupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa,kerjasama pemanfaatan BMN) telah diatur dalam Keputusan Menteri PertanianNomor 788/Kpts/PL.310/11/2017 tentang Pendelegasian Sebagian KewenanganMenteri Pertanian Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Eselon I dan KepalaSatuan Kerja di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara , sebagai berikut :

Kegiatan		Pengelola Barang		
		KPKNL	Kanwil DJKN	PKNSI
Jenis dan Nilai BMN		Tanah dan Bangunan		
		sd 5 M	>5 sd 10 M	>10 sd 25 M
		Selain Tanah dan Bangunan		
		sd 2,5	>2,5 sd 5 M	>5 sd 10M
a.	Mendandatangani surat pernyataan, surat keterangan, dan naskah dinas lain terkait PSP BMN	Satker	Satker	Satker
b.	Mengusulkan sewa	Satker	Eselon I	Sekjen
c.	Penetapan pelaksana sewa dan penandatangan perjanjian sewa	Satker	Satker	Satker
d.	Mengusulkan pinjam pakai	Satker	Eselon I	Sekjen
e.	Penandatanganan pinjam pakai	Eselon I	Eselon I	Eselon I
f.	Mengusulkan KSP	Satker	Eselon I	Sekjen
g.	Pemilihan Mitra KSP dan penandatangan perjanjian Kerjasama	Satker	Satker	Satker

e. Piutang Jangka Panjang

1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan.

f. Aset Lainnya

1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan senilai nilai tercatat neto yaitu senilai harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel A.5.3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan senilai nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat senilai nilai nominal, yaitu senilai nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel B.1.1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
PNBP	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

Berdasarkan Tabel B.1.1 tidak terdapat realisasi Hal ini disebabkan karena tidak adanya penerimaan pendapatan pada tahun 2023.

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi pendapatan 31 Desember 2023 dan 31Desember 2022.

Tabel B.1.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Total	**0**	**0**	**0**

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 sebesar Rp.0 berasal dari Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.916.373.058,- atau 97% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.008.601.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel B.2. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Periode yang berakhir 31 Desember 2023				% Real Anggaran
	Anggaran (Rp)	Realisasi bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
Belanja Barang	3.008.601.000	2.916.373.058	0	2.916.373.058	97
Belanja Modal	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja	**3.008.601.000**	**2.916.373.058**	**0**	**2.916.373.058**	**97**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Gambar B.2

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk 31 Desember 2023 ditunjukkan padaTabel B.2.2.

Tabel B.2.1 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Kegiatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023

Uraian	Periode yang berakhir 31 Desember 2023				% Real Anggaran
	Anggaran (Rp)	Realisasi bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	
6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	100.000.000	98.994.838	0	1.005.162	98,99

6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.435.879.000	1.365.846.394	0	70.032.606	95,12
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	632.095.000	616.127.706	0	15.967.294	97,47
6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	840.627.000	835.404.120	0	5.222.880	99,38
Total	**3.008.601.000**	**2.916.373.058**	**0**	**92.227.942**	**96,93**

Tabel rincian Realisasi per jenis belanja berdasarkan kegiatan disajikan pada **Lampiran B.1.**

Dibandingkan dengan realisasi belanja 31 Desember 2022 sebesar Rp.0 maka realisasi belanja 31 Desember 2023 sebesar Rp.2.916.373.058,- mengalami peningkatan sebesar Rp.2.916.373.058,- atau 100%. Hal ini disebabkan oleh karena pada Tahun 2022 Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi belum memiliki Pagu Anggaran.

Tabel B.2.2 Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Belanja	Anggaran 2023	Realisasi Netto 31 Desember 2023	Anggaran 2022	Realisasi Netto 31 Desember 2022	Naik (Turun)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Pegawai	0	0	0	0	0
Belanja Barang	3.008.601.000	2.916.373.058	0	0	2.916.373.058
Belanja Modal	0	0	0	0	0
Jumlah	**3.008.601.000**	**2.916.373.058**	**0**	**0**	**2.916.373.058**

B.3. BELANJA BARANG

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.916.373.058 dan Rp.0. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp.2.916.373.058 atau 100% dari Realisasi Belanja Barang

31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena pada Tahun 2022 Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi belum memiliki Pagu Anggaran maka pada Tahun 2023 terjadi peningkatan 100% Belanja Barang.

Tabel B.4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember2023

Uraian Belanja Barang	Anggaran	Realisasi Netto	% Realisasi
Belanja Honor Operasional Satuan kerja	32.300.000	32.300.000	100
Belanja Bahan	377.797.000	370.690.800	98,12
Belanja Honor Output kegiatan	282.030.000	280.630.000	99,5
Belanja barang non operasional lainnya	430.000.000	404.879.000	94,16
Belanja barang persediaan barng konsumsi	148.911.000	148.662.800	99,83
Belanja Jasa Profesi	68.000.000	67.400.000	99,12
Belanja Jasa Lainnya	121.500.000	120.609.660	99,27
Belanja Perjalanan biasa	884.757.000	856.931.960	96,86
Belanja Perjalanan dinas paket meeting luar kota	157.720.000	146.938.838	93,16
Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	550.000	150.000	27,27
Belanja perjalanan dinas dalam kota	143.658.000	133.762.000	93,11
Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	211.378.000	203.418.000	96,23
Belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karaktersitik bantuan pemerintah	150.000.000	150.000.000	100
Jumlah	**3.008.601.000**	**2.916.373.058**	**96,93**

Tabel B.4.1 Perbandingan Realisasi Belanja Barang akun Detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian Belanja Barang	31 Desember 2023			31 Desember 2022			Naik (Turun) (%)
	Anggaran (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	Anggaran (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	
Belanja honor operasional satuan kerja	32.300.000	0	32.300.000	0	0	0	100
Belanja bahan	377.797.000	0	370.690.800	0	0	0	100
Belanja honor output kegiatan	282.030.000	0	280.630.000	0	0		100
Belanja barang non operasional	430.000.000	0	404.879.000	0	0	0	100
Belanja barang persdiaan barang konsumis	148.911.000	0	148.662.800	0	0	0	100

Belanja jasa profesi	68.000.000	0	67.400.000	0	0	0	100
Belanja Jasa Profesi	68.000.000	0	67.400.000	0	0	0	100
Belanja Perjalanan Biasa	884.757.000	0	856.931.960	0	0	0	100
Belanja Perjalanan dinas paket meeting luar kota	157.720.000	0	146.938.838	0	0	0	100
Belanja pengiriman surat dinas pos	550.000	0	150.000	0	0	0	0
Belanja perjalanan dinas dalam kota	143.658.000	0	133.762.000	0	0	0	0
Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota	211.378.000	0	203.418.000	0	0	0	0
Belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karaktersitik bantuan pemerintah	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0
Jumlah	**3.008.601.000**	**0**	**2.916.373.058**	**0**	**0**	**0**	**100**

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang periode yang berakhir 31 Desember 2023 per mata anggaran dapat dilihat pada Lampiran B.4.1.

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami penurunan/peningkatan sebesar Rp.0,- atau 0% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2022.

Tabel B.5. Perbandingan Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi Netto	Naik (Turun)
	31 Desember 2023		31 Desember 2023	31 Desember 2022	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B.5.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp 0,-. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 tidak mengalami peningkatan/penurunan sebesar Rp.0,-. atau 0% dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya belanja modal peralatan dan mesin pada Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Tabel B.5.1. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk periode yang berakhir 30 September 2023 dan 30 September 2022

URAIAN	REALISASI 31 Desember 2023	REALISASI 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET LANCAR

C.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- dengan rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

Tabel C.1. Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Keterangan	31 Desember 2023(Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penurunan/ peningkatan (Rp)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran UP	0	0	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**	**0**

C.2 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing- masing sebesar Rp0,-. dan Rp.0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai berikut :

Tabel C.2. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penurunan/peningkatan (Rp)	%
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

C.3 PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah senilai Rp.148.662.800,- dan Rp.0,-.

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual,dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini disajikan perbandingan rincian Jenis Persediaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel C.3 Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Penurunan/ peningkatan (Rp)	%
Barang persediaan Konsumsi	148.662.800	0	148.662.800	100
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0	100
Jumlah	**148.662.800**	**0**	**148.662.800**	**100**

Rincian mutasi Persediaan pada Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah berupa Persedian barang konsumsi berupa Alat Tulis Kantor

Kode Uraian	Saldo Awal		Mutasi tambah		Mutasi Kurang		Saldo Akhir	
	Qty	Nilai	Qty	Nilai	Qty	Nilai	Qty	Nilai
117111 - Barang Konsumsi	0	0	**0**	0	**0**	0	**0**	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PENJELASAN MUTASI BARANG PERSEDIAAN

1. Barang Konsumsi

Saldo Barang Konsumsi pada satuan kerja Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp.0,-, mutasi tambah selama periode pelaporan sebesar Rp.0,-, dan mutasi kurang selama periode pelaporan sebesar Rp0,-.

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
A. Saldo Awal	**0**	**0**
B. Mutasi Tambah	**0**	**0**
Pembelian	**0**	0
C. Mutasi Kurang	**0**	**0**
Pemakaian	**0**	0
D.Saldo Akhir	**0**	**0**

Penjelasan mutasi penambahan dan pengurangan atas nilai Barang Konsumsi adalah sebagai berikut :

Mutasi tambah atas nilai Barang Konsumsi senilai Rp.0, berasal dari : pembelian belanja bahan berupa alat-alat tulis kantor habis pakai untuk menunjangkegiatan satker.

Mutasi Kurang atas nilai Barang Konsumsi senilai Rp0, Berasal dari :pemakaian bahan berupa alat-alat tulis kantor habis pakai untuk menunjang kegiatan satker.

ASET TETAP

Nilai Aset Tetap Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah masing–masing senilai Rp0 dan Rp0. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Tabel C.4 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Penurunan/ peningkatan (Rp)	%
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4	Jalan. Irigasi. dan Jaringan	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0	0

7	Akumulasi Penyusutan	0	0	0	0
Jumlah		**0**	**0**	**0**	**0**

C. 4 TANAH

Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0.

C.5 PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing masing senilai Rp0 dan Rp0 Mutasi Aset Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

Tabel C.5 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	30 Desember 2022(Rp)
Peralatan dan Mesin	0	0	0	0

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut :

Tabel C.5.1 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Total Mutasi Tambah	**0**
Mutasi Kurang	0
Total Mutasi Kurang	**0**

Tabel C.5.2 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023Setelah Akumulasi Penyusutan

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2023	**0**
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	0
Saldo Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 :

Tabel C.5.3. Rincian Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Belanja Aset Peralatan dan Mesin :	
Belanja Peralatan dan Mesin	0
Mutasi :	
Pembelian	0
Pengembangan langsung	0
Total Mutasi Aset	0
Selisih	0
Penjelasan Selisih :	
Pembelian Ekstrakomptabel	0
BM Peralatan Mesin untuk Pengembangan/Perolehan Aset selain PM	0
Perolehan/Pengembangan PM dari BM selain BM Peralatan & Mesin	0
Perolehan/Pengembangan PM dari Belanja Modal Lainnya	0
Belum SP2D	0

Belanja Modal Peralatan dan mesin menurut LRA sebesar Rp.0,-

C.6 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0. Mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel C.6 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023

Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Gedung dan Bangunan	0	0	0	0

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Tabel C.6.1. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi Tambah	
Koreksi Kesalahan input IP	0
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	0
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	0
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	
Hibah (Keluar)	0
Koreksi Kesalahan input IP	0
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak Ditemukan	0
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	0
Total Mutasi Kurang	0

Adapun nilai saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 setelah akumulasipenyusutan adalah sebagai berikut :

Tabel C.6.2. Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023Setelah Akumulasi Penyusutan

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	0
Saldo Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023.

Tabel C.6.3. Rincian Pencatatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI (Rp)
Pencatatan Gedung dan Bangunan SAIBA	**0**
Pencatatan Gedung dan Bangunan SIMAK	0
Selisih	0

Pencatatan SIMAK dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU	0
Total Belanja Gedung dan Bangunan	0
Hibah (Masuk)	0
Pembelian	0
Pengembangan KDP	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
Perolehan/Penambahan KDP	0
Total Pencatatan Gedung dan Bangunan	**0**
Selisih	0

Belanja Gedung dan Bangunaan menurut LRA sebesar Rp0, menurut data di simak-bmn sebesar Rp0, sehingga tidak terdapat selisih.

C.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing masing senilai Rp0 dan Rp0.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Tabel C.7 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		0	0	0

ASET LAINNYA

C.8 ASET TAK BERWUJUD

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud terdiri dari Hak Cipta, Paten, Software, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.8. Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud per Jenis Aset

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penurunan/peningkatan	%
1	Hak Cipta	0	0	0	0
2	Paten	0	0	0	0
3	Software	0	0	0	0
4	Lisensi	0	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0	0
Jumlah		0	0		0

Rincian mutasi aset tidak berwujud adalah sebagai berikut.

Tabel C.8.1. Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023

Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023(Rp)
Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tidak berwujud adalah sebagai berikut.

Tabel C.8.2. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2023	**0**
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Koreksi Pencatatan	0
Mutasi kurang:	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Penghapusan	0
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Keluar	0
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud dari belanja modal pada 31 Desember 2023 dapatdilihat pada tabel berikut :

Tabel C.8.3 Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dari Belanja Modal Lainnya

URAIAN	NILAI (Rp)
Pencatatan Aset Tak Berwujud SAIBA	0
Pencatatan Aset Tak Berwujud SIMAK	0
Selisih	0
Pencatatan SIMAK dari Belanja Modal Lainnya	0

Belanja modal lainnya	0
Mutasi :	0
Pembelian	0
Pengembangan langsung	0
Koreksi Aset Tak Berwujud Lainnya	0
Total Mutasi Aset	0
Selisih	0

Aset Tak Berwujud berupa software Aplikasi Neraca Pangan Wilayah pada Direktorat Ketersediaan Pangan ini terdapat pada satker Satker Pusat.

C.9 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilaiRp0 dan Rp0 Aset Lain -lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam

kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi serta dalam proses penghapusan dari BMN

Rincian mutasi Aset Lain-Lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel C.9. Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023

Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lain-lain	0	0	0	0

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel C.9.1. Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Reklasifikasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
Total Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan)	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
Total Mutasi Kurang	0

Adapun nilai saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 setelah akumulasi penyusutan adalahsebagai berikut :

Tabel C.9.2. Rincian Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023Setelah Akumulasi Penyusutan

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo per 31 Desember 2032	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2023	0
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

C.10 AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi per 30 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan/peningkatankapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel C.10 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	**Aset Tak Berwujud**			
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	0	0	0
3	Software	0	0	0
4	Lisensi	0	0	0
5	Hasil Kajian/Penelitian	0	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
Jumlah		0	0	0
B	**Aset Lain-Lain**			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
2	Aset Tak Berjuwud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
Jumlah		0	0	0
Total		0	0	0

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersaji sebesarRp0,- dan Rp0.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi per 31 Desember 2023 dan 31Desember 2022 disajikan pada di bawah ini.

Tabel C.11 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penurunan/ peningkatan	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	0	0	0

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penurunan/ peningkatan	%
Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0	0	0
Uang Muka Dari KPPN	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang kepada pihak ketiga dan Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,-dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel C.11.1. Perbandingan Rincian Utang Pihak Ketiga

NO	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penurunan/ peningkatan(Rp)	%
1	Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0

C.11 UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0.

Tabel C.12. Perbandingan Rincian Utang yang belum ditagihkan

NO	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Penurunan/ peningkatan(Rp)	%
1	Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi jambi	0	0	0	0
Jumlah		**0**	0	0	0

C.12 UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerjadan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

EKUITAS

C.13 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Apabila dibandingkan perbedaan nilai atas Pendapatan LRA dan LO sebagai berikut:

Tabel D. Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2023

URAIAN	LRA	LO	SELISIH
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Pendapatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Tidak ada selisih antara Pendapatan Negara Bukan Pajak menurut LRA dan Pendapatan Negara Bukan Pajak menurut LO.

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel D.1 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

KETERANGAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik (TURUN)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	0	0	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
Total	0	0	0

D.2 Beban Persediaan

Saldo Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing- masing sebesar Rp. 148.662.800,- dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 September 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel D.3. Perbandingan Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	148.662.800	0	100
Jumlah Beban Persediaan	148.662.800	0	100

Tabel D.3.1. Perbandingan Belanja Pegawai di LRA dan Beban Pegawai di LO per 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
Beban Persediaan konsumsi	148.662.800	148.662.800	148.662.800
Jumlah	148.662.800	148.662.800	148.662.800

D.3 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel D.4. Perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0
Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	32.300.000	0	100
Pengembalian Beban Honor Oprasional SatuanKerja	0	0	0
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Bahan	370.690.800	0	100
Pengembalian Beban Bahan	0	0	0
Beban Honor Output Kegiatan	280.630.000	0	100
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	0	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	404.879.000	0	100

Pengembalian belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0
Beban Langganan Listrik	0	0	0
Beban Langganan Telepon	0	0	0
Beban Langganan Air	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0
Beban Sewa	0	0	0
Beban Jasa Profesi	67.400.000	0	100
Beban Jasa Lainnya	120.609.660	0	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	150.000		
Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah	**1.276.659.460**	0	100

Tabel D.4.1 Perbandingan Belanja Barang dan Jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasa di LO per 31 Desember 2023

AKUN	URAIAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
521111	Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0
521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	32.300.000	0	32.300.000
521115	Pengembalian Beban Honor Oprasional SatuanKerja	0	0	0
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0
521211	Beban Bahan	370.690.000	0	370.690.000
521211	Pengembalian Beban Bahan	0	0	0
521213	Beban Honor Output Kegiatan	280.630.000	0	280.630.000
521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	0	0
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	404.879.000	0	404.879.000
521219	Pengembalian belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0
522112	Beban Langganan Telepon	0	0	0
	Beban Langganan Air	0	0	0
522131	Beban Jasa Konsultan	0	0	0
522141	Beban Sewa	0	0	0
522151	Beban Jasa Profesi	67.400.000	0	67.400.000
522191	Beban Jasa Lainnya	120.609.660	0	120.609.660
521114	Beban Pengiriman surat dinas pos pusat	150.000	0	150.000
522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	0	0
Total		**1.276.659.460**	0	**1.276.659.460**

D.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel D.5 Perbandingan Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhirpada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	30 September 2023	30 September 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Total	0	0	0

Tabel D.5.1 Perbandingan Belanja Pemeliharaan di LRA dan Beban Pemeliharaan di LO untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	BELANJA LRA	PENYESUAIAN	BEBAN LO
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Total	0	0	0

Realisasi Belanja Pemeliharaan terdapat penyesuaian menurut LRA dan LO sebesar Rp0 disebabkan karena Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi tidak memiliki asset berupa Gedung dan Bangunan.

D.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.341.050.798,- dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untukperjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.6 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK/ (TURUN)%
Beban Perjalanan Biasa	856.931.960	0	100
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	133.762.000	0	0
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	203.418.000	0	0
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	0	0	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	146.938.838	0	100
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Jumlah Beban Persediaan	**1.341.050.798**	**0**	**100**

Tabel D.6.1 Perbandingan Belanja Perjalanan Dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas diLO per 30 September 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Belanja LRA	Penyesuaian	Beban LO
Beban Perjalanan Biasa	856.931.960	0	856.931.960
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	133.762.000	0	133.762.000
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	203.418.000	0	203.418.000
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	146.938.838	0	146.938.838
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0

Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0	0
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	0	0
Total	**1.341.050.798**	**0**	**1.341.050.798**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Biasa terdapat penyesuaian menurut LRA dan LO sebesar Rp.1.341.050.798 sudah ditagihkan ke KPPN.

D.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan/peningkatan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel D.7 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0
Beban Amortisasi Software	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**0**	**0**	**0**

Realisasi Penyusutan dan Amortisasi menurut LRA sebesar Rp.0 sedangkan menurut LO sebesar Rp0. Tidak ada penyesuaian antara Realisasi Belanja Penyusutan dan Amortisasi menurut LRA dan Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut LO.

D.7 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsientitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember

2022 adalah sebesar Rp.-2.916.373.058,- dan Rp0.

Rincian Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel D.8 Perbandingan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasianal Lainnya	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**0**	**0**	**0**

- **Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

  Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp0 terdiri atas akun sebagai berikut :

AKUN	NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0
	Total	0

  - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu padaSatker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebesar Rp0.

Realisasi pendapatan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut LRA sebesar Rp.0 sedangkan menurut LO sebesar Rp.0,- Tidak ada selisih antara Realisasi Belanja Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut LRA dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut LO.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

D.8 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0.

D.9 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember

2022 adalahsebesar Rp.-2.916.373.058 dan Rp0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

Uraian Koreksi Nilai Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	0	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

E.3.2 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 Rp0. Koreksi atas Akumulasi Amortisasi Software terpadat pada Badan Ketahanan Pangan Pusat.

Tabel E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi Per 31 Desember 2023 dan 2022 ***(dalam Rupiah)***

Uraian Koreksi Atas Reklasifikasi	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Akumulasi Amortisasi Software	0	0	0
	0	0	0

E.3.3 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan hasil inventarisasi dan penilaian kembali oleh KPKNL atas aset-aset pada Kementerian Pertanian.

Tabel E.3.3 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0
	0	**0**	**0**

E.3.4 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam Rupiah)

Uraian Koreksi Nilai Aset Non Reval	31 Desember 2023	31 Desember 2022	% Naik/ (Turun)
Aset Tetap	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah	**0**	**0**	**0**

E.3.5 KOREKSI LAIN-LAIN

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing- masing sebesar Rp.2.916.373.058 dan Rp0. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel E.4 Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 *(dalam Rupiah)*

Akun	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.916.373.058	0
313121	Diterima dari Entitas Lain	0	0
JUMLAH		**2.916.373.058**	**0**

E.4.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN / DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode

hingga 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp0 dan Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4.2 TRANSFER KELUAR/TRANSFER MASUK

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

E.4.3 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0.

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masingsebesar Rp.0,- dan Rp0.

E. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 tentang Badan Pangan Nasioanal, bahwa Satker Dinas Ketahan Pangan Provinsi Jambi merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian diintegrasikan menjadi tugas dan fungsi Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Pasal 45).

Satker Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada Tahun Anggaran 2023 mendapat DIPA-125.01.3.690708/2023 tanggal 25 Juli 2023.Namum proses revisi dan penyelesaian pada bulan Agustus.

Untuk Surat Keputusan Gubernur Jambi No. 632/KEP.GUB/DISHANPAN 1.1/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 53/SK/DISHANPAN-1.1/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Hasil Pekerjaan, Petugas SAI, Petugas SIMAK BMN, Staf Pengelola Keuangan / KPA dan Staf Pengelola Keuangan /PPK Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2023.

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

BADAN PANGAN NASIONAL
BADAN PANGAN NASIONAL (*NATIONAL FOOD AGENCY*)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7804476, 7807377, 7802619, 7804367 Faksimili (021) 7802619;
Website: http://badanpangan.go.id/ ; Email:
nfa_official@badanpangan.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor: 690708/LK-TAHUNAN/I/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh empat** telah dilakukan kesepakatan nilai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Barang Milik Negara antara Satuan Kerja **Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi** kode satker **690708** yang selanjutnya disebut **Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B),** dengan Eselon I Badan Pangan Nasional kode BA.125.01 yang selanjutnya disebut **Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang.**

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Barang Milik Negara yang sudah ditandatangani oleh Petugas Satker, Tim Verifikator dan Tim Reviu Inspektorat sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan tingkat **Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang**, berupa **Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Barang Milik Negara.**

Selanjutnya Petugas SAI tingkat satker menyediakan data Catatan atas Laporan Keuangan dan Catatan Laporan Barang Milik Negara yang disampaikan ke UAPA/B yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi.

Laporan Keuangan dan BMN lengkap serta Catatan Hasil Reviu (terlampir) dituangkan ke dalam Berita.

Mengetahui,

Tingkat Satker		Verifikator	
Petugas LK	Petugas LBMN	Laporan Keuangan	Laporan BMN
Nurpita Sari, SE	Dinda Irza Yulfani, SP	Ngaisatun Kholifah	Galuh Dwi Putra

Pengendali Teknis	Penanggungjawab Kegiatan
Gustanty Dian Fitrilia, SE,M.AK	Todilah, S.AP., M.AP.

CATATAN HASIL REVIU (CHR)
LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA/B TAHUNAN TA 2023

BADAN PANGAN NASIONAL		
	Disusun oleh	: Charles Yotomaruangi,SE/ Ahmad Burhanudin,SP,MM
	Tanggal	: 23 Januari 2024
	Direviu KT oleh	: Euis Meilina, S.Pd.,M.A.P.
	Tanggal/paraf	: 23 Januari 2024
	Disetujui PT oleh	: Gustanty Dian Fitrilia, SE, M.Ak
	Tanggal/paraf	: 23 Januari 2024
	Disetujui PM oleh	: R. Muh. Imron Rosjidi
	Tanggal/paraf	: 23 Januari 2024

UAPA	: Badan Pangan Nasional (125)
UAPPA/B-Es 1	: Badan Pangan Nasional (01)
UAPPA/B-W	: -
UAKPA/B	: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Kode satker: 690708)

	Uraian Catatan Hasil Reviu	Indeks KKR
Penyelenggaraan Akuntansi :		
1	Tidak terdapat perbedaan pada Rekonsiliasi SAKTI-SPAN	KKR - PA
2	Tidak terdapat pagu minus MonSakti	
3	Tidak terdapat saldo tidak normal	
4	Tidak terdapat Aset Tetap Belum di Detailkan	
5	Terdapat Persediaan Belum Diregister dan sudah dijelaskan pada CaLK	
6	Tidak terdapat piutang TP/TGR	
7	Tidak terdapat Ketidaksesuaian Kode Akun dan Kode BMN	
8	Tidak terdapat Ketidaksesuaian Kode Akun dan Kode Persediaan	
9	Tidak terdapat Reklasifikasi Keluar (RK) Persediaan	
10	Tidak terdapat Reklasifikasi Keluar (RK) Aset	
Penyajian LK		
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)		KKR - LRA
1	Tidak terdapat selisih Realisasi Belanja antara nilai SPAN dan SAKTI	
2	Tidak terdapat Pengembalian Belanja	
3	Tidak terdapat Pendapatan Bukan Pajak	
4	Tidak terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak	
5	Tidak terdapat Realisasi Belanja Pegawai	
6	Tidak terdapat PNBP	
7	Tidak ada kegiatan yang menghasilkan PNBP	
8	Tidak terdapat PNBP	
9	Tidak terdapat realisasi belanja barang persediaan	
10	Tidak terdapat realisasi belanja barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat	
11	Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal	
B. Laporan Operasional (LO)		KKR - LO
1	Tidak terdapat Beban Pegawai	
2	Beban Persediaan pada LO telah sama dengan Transaksi Pemakaian Persediaan (Habis Pakai) pada Aplikasi Monsakti (menu laporan, Rincian Laporan Keuangan, Rincian/CaLKBMN barang-barang yang termasuk persediaan)	
3	Tidak terdapat Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	
C. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)		KKR - LPE
1	Saldo awal ekuitas telah sesuai dengan saldo ekuitas neraca periode sebelumnya	
2	Tidak terdapat Nilai akun Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) dalam LPE	
3	Nilai akun yang ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) telah sesuai dengan belanja dalam LRA	
4	Tidak terdapat aset yang diterima dari satker yang berasal dari luar entitas akuntansi	
5	Tidak terdapat aset yang keluar dari entitas akuntansi	
6	Tidak terdapat koreksi nilai persediaan, dan Nilai Persediaan adalah Nihil	
D. Neraca		KKR - Neraca
1	Saldo awal neraca telah sesuai dengan saldo akhir 31 Desember 2022 (neraca periode sebelumnya.)	
2	Terdapat Saldo kas di bendahara pengeluaran nihil dan tidak terdapat negatif	
3	Tidak ada Bendahara Penerimaan	

	Uraian Catatan Hasil Reviu	Indeks KKR
4	Tidak Terdapat saldo setara kas	
5	Tidak terdapat saldo Piutang Bukan Pajak	
6	Tidak terdapat saldo Bagian TP/TGR	
7	Tidak Terdapat saldo persediaan	
8	Tidak terdapat saldo Aset Tetap Lainnya	
9	Tidak terdapat Saldo Piutang TP/TGR	
10	Tidak terdapat saldo Aset Tak Berwujud	
11	Tidak terdapat saldo Aset Lain-lain	
12	Tidak terdapat saldo Aset Lainnya	
13	Tidak terdapat saldo Pendapatan Diterima Dimuka	
E.	**Neraca Aset Tetap**	**KKR - Neraca Tetap**
1	Tidak terdapat saldo Aset Tetap	
2	Tidak terdapat saldo Aset Tetap	
3	Tidak terdapat Aset Tetap	
4	Tidak terdapat saldo Aset Tetap	
5	Tidak terdapat belanja modal	
6	Tidak ada nilai mutasi tambah dan kurang aset tetap	
7	Tidak terdapat Aset Tetap	
8	Tidak terdapat Aset Tetap sehingga tidak terdapat penyusutan	
9	Tidak terdapat Realisasi Belanja akun 526	
10	Tidak terdapat Aset Tanah	
11	Tidak terdapat Aset yang dikuasai oleh pihak ketiga	
12	Tidak terdapat aset GB, PM, dan JIJ	
13	Tidak terdapat aset Tanah, GB, PM, JIJ, Aset Tak berwujud dan aset tetap lainnya sehingga tidak ada PSP	
F.	**CaLK dan CaLBMN**	**KKR - CaLK dan CaLBMN**
1	Saldo akun pada Neraca CaLK dan Neraca CaLBMN sudah sesuai dan disajikan/diungkapkan secara memadai	
2	Tidak terdapat Aset Tetap sehingga tidak ada Penetapan Status Penggunaan (PSP) Aset Tetap	
Koreksi/Perbaikan yang belum dilakukan		
1		
2		
3		
4		
5		

Bandung, 23 Januari 2024

Petugas Penyusun LK

Nurpita Sari, SE

Pereviu

Ahmad Burhanudin, SP, MM

Petugas SIMAK-BMN

Dinda Irza Yulfai, SP

Charles Yotomaruangi, SE

Euis Meilina, S.Pd.,M.A.P.

Gustanty Dian Fitrilia, SE, M.Ak

*) Coret yang tidak perlu

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTER II TA 2023

Kode dan Nama UAKPA : (....) .....
Kode dan Nama UAPPAW : (....) .....
Kode dan Nama Eselon 1 : (....) BADAN PANGAN NASIONAL
Kode dan Nama K/L : (690708) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				

	Rekon SAKTI-SPAN *(Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓	Tidak
	a. Pagu/DIPA		✓	Tidak
	b. Estimasi PNBP		✓	Tidak
	c. Belanja		✓	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	e. Pendapatan		✓	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		✓	Tidak
	g. Kas BLU		✓	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		✓	Tidak
	i. Kas Hibah		✓	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		✓	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		✓	Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		✓	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		✓	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		✓	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		✓	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		✓	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		✓	Tidak

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL

	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		✓	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	✓		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	✓		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	✓		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	✓		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		✓	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		✓	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		✓	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		✓	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		✓	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		✓	Tidak

9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		✓	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		✓	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		✓	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		✓	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		✓	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		✓	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		✓	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		✓	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		✓	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		✓	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		✓	Tidak
	Hibah Langsung	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		✓	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		✓	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		✓	Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		✓	Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		✓	Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		✓	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		✓	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		✓	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**		✓	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		✓	Ya/Tidak

3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		✓	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		✓	Ya/Tidak
102	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		✓	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah			Ya/Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	✓		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	✓		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	✓		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	✓		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		✓	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	✓		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		✓	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		✓	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		✓	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		✓	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	✓		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	✓		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	✓		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya	✓		Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		✓	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	✓	✗	Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	✓		Ya
	PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)			
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		✓	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		✓	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		✓	Tidak

4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		✓	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		✓	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		✓	Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		✓	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	✓		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	✓		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :		✓	Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)		✓	Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		✓	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		✓	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	✓		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	✓		Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		✓	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		✓	Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		✓	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual		✓	Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?		✓	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		✓	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?		✓	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?		✓	Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA		✓	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?		✓	Ya
	LAK BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?		-	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?		-	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca		-	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU		-	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca		-	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca		-	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU		-	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

Nespita Sari, S.E.
NIP 198606222010012009

Bandung , Januari 2024
Penelaah/Verifikator

Ngaisatun Kholifah, S.E
NIP 199207122018012001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI JAMBI
KPPN JAMBI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 690708
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,008,601,000	3,008,601,000	0
2	Belanja	2,916,373,058	2,916,373,058	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24